

PROFIL PEMBANGUNAN BANTEN

A. GEOGRAFIS DAN ADMINISTRASI WILAYAH

Secara geografis Provinsi Banten terletak pada 8°3'40" - 8°50'48" Lintang Selatan dan 114°25'53" - 115°42'40" Bujur Timur. Relief dan topografi Pulau Banten di tengah-tengah terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur. Provinsi Banten terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Batas fisiknya adalah Utara : Laut Banten, Timur : Selat Lombok (Provinsi Nusa Tenggara Barat), Selatan : Samudera Indonesia, Barat : Selat Banten (Provinsi Banten)

Secara administrasi, Provinsi Banten terbagi menjadi 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota, 154 Kecamatan dan 1.267 Desa/Kelurahan



B. SOSIAL EKONOMI DAN KEPENDUDUKAN

B1. Kependudukan

Jumlah penduduk di Provinsi Banten tahun 2011 sebanyak 11.005.518 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 1.139 jiwa per km². Penyebaran penduduk di Provinsi Banten masih bertumpu di Kabupaten Tangerang yakni sebesar 26,9 persen dan Kota Tangerang yakni sebesar 17 persen sedangkan yang terendah di Kabupaten Cilegon sebesar 3,5 persen. Sementara dilihat dari kepadatan penduduk Kabupaten/Kota yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kota Tangerang yakni sebanyak 12.147 jiwa per Km² dan yang paling rendah adalah Kabupaten Lebak dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 359 jiwa per Km².

Tabel 1:

Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2011

Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Jumlah	Kepadatan Penduduk per km ²
Pandeglang	2.746,89	1.172.179	427
Lebak	3.426,56	1.228.884	359
Tangerang	1.011,86	2.960.474	2.926
Serang	1.734,28	1.434.137	827
Tangerang	153,93	1.869.791	12.147
Cilegon	175,50	385.720	2.198
Serang	266,71	598.407	2.244
Tangerang Selatan	147,19	1.355.926	9.212
Jumlah	9.662,92	11.005.518	1.139

Sumber: Provinsi Dalam Angka tahun 2012

B2. Ketenagakerjaan

Perkembangan ketenagakerjaan di Provinsi Banten dalam 5 tahun terakhir menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, penduduk bekerja, dan jumlah pengangguran terbuka. Perkembangan penduduk usia kerja, penduduk bekerja secara absolute menunjukkan peningkatan. Namun jumlah pengangguran terbuka cenderung meningkat.

Penduduk Usia Kerja, Perkembangan jumlah penduduk usia kerja dalam lima tahun terakhir meningkat, jumlah penduduk usia kerja tahun 2012 mencapai 7.880,9 ribu jiwa lebih besar dari tahun 2008, dengan jumlah angkatan kerja mencapai 5.125,05 ribu jiwa dan bukan angkatan kerja 2.755,85 ribu jiwa. Penyebaran penduduk usia kerja paling banyak terdapat di Kabupaten Tangerang yaitu sebanyak 2.088,66 ribu jiwa.

Tabel 2:

Perkembangan Penduduk Usia Kerja Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2008 dan 2012

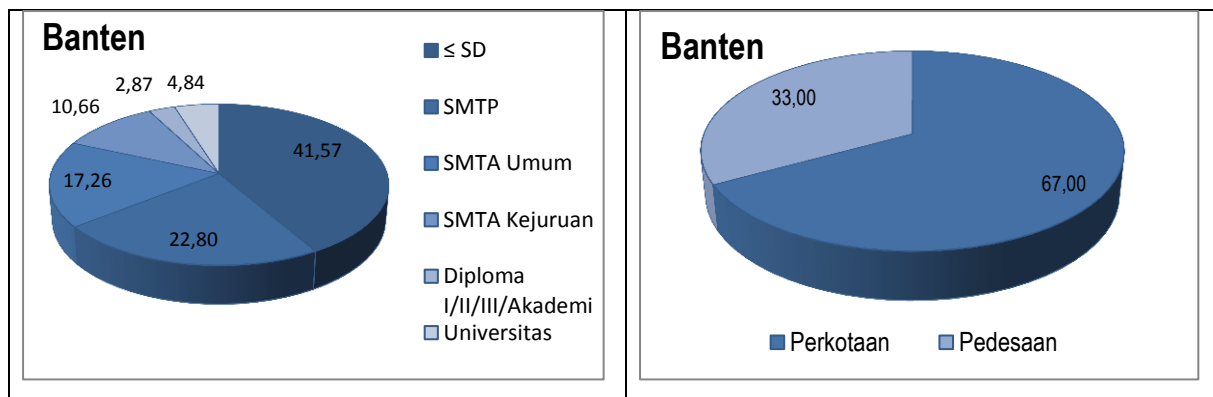
Kabupaten/Kota	Penduduk Usia Kerja					
	2008			2012		
	Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah	Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah
BANTEN	4.325.455	2.349.440	6.674.895	5.125.057	2.755.858	7.880.915
Kabupaten Pandeglang	468.438	247.387	715.825	571.074	256.379	827.453
Kabupaten Lebak	531.653	254.608	786.261	558.752	325.859	884.611
Kabupaten Tangerang	1.658.475	858.667	2.517.142	1.328.081	760.579	2.088.660
Kabupaten Serang	721.522	478.135	1.199.657	669.029	367.131	1.036.160
Kota Tangerang	788.955	406.346	1.195.301	916.226	456.581	1.372.807
Kota Cilegon	156.412	104.297	260.709	180.030	93.811	273.841
Kota Serang	0	0	0	263.206	150.076	413.282
Kota Tangerang Selatan	0	0	0	638.659	345.442	984.101

Sumber : Sakernas (Agustus), BPS 2012

Penduduk usia kerja menurut tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, meskipun memiliki potensi penduduk usia produktif yang besar, namun sebagian besar masih merupakan tamatan pendidikan dasar mencapai 41,57 persen, dan menengah (SMP dan SMA) mencapai sekitar 50,72 persen. Sementara untuk tamatan pendidikan tinggi (universitas dan akademi) tidak sampai 10 persen dari total penduduk usia kerja. Sementara berdasarkan tipe daerah, sebagian besar penduduk usia kerja terdapat di perkotaan, yaitu sekitar 67,00 persen.

Gambar 2:

Distribusi Penduduk Usia Kerja menurut Pendidikan dan Tipe Daerah di Provinsi Banten Tahun 2012



Sumber : Sakernas (Agustus), BPS 2012

Angkatan kerja. Perkembangan angkatan kerja Provinsi Banten dalam 5 tahun terakhir meningkat, jumlah angkatan kerja tahun 2013 (Feb.) sebanyak 5.475,87 ribu jiwa atau sebesar 4,52 persen yang terdiri dari 4.922,98 ribu jiwa penduduk bekerja dan 552,89 ribu jiwa pengangguran terbuka. Penyebaran angkatan kerja tahun 2012 terbesar di Kabupaten Tangerang mencapai 1.328,08 ribu jiwa, dan paling sedikit di Kota Cilegon sebanyak 180,03 ribu jiwa.

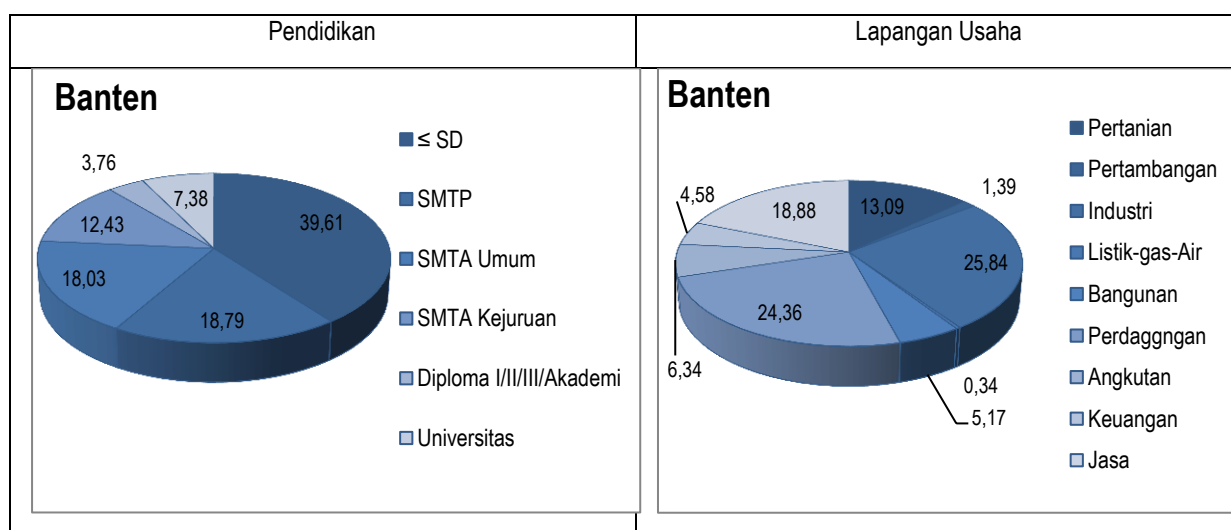
Tabel 3:
Perkembangan Angkatan Kerja Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2008 dan 2012

Kabupaten/Kota	Angkatan Kerja			
	2008		2012	
	Penduduk Bekerja	Pengangguran Terbuka	Penduduk Bekerja	Pengangguran Terbuka
Kabupaten Pandeglang	416,319	52,119	517,943	53,131
Kabupaten Lebak	474,846	56,807	508,065	50,687
Kabupaten Tangerang	1.405,901	252,574	1.175,846	152,235
Kabupaten Serang	602,539	118,983	582,314	86,715
Kota Tangerang	642,049	146,906	840,092	76,134
Kota Cilegon	127,241	29,171	159,670	20,360
Kota Serang	0	0	234,786	28,420
Kota Tangerang Selatan	0	0	587,131	51,528

Sumber : Sakernas (Agustus), BPS 2012

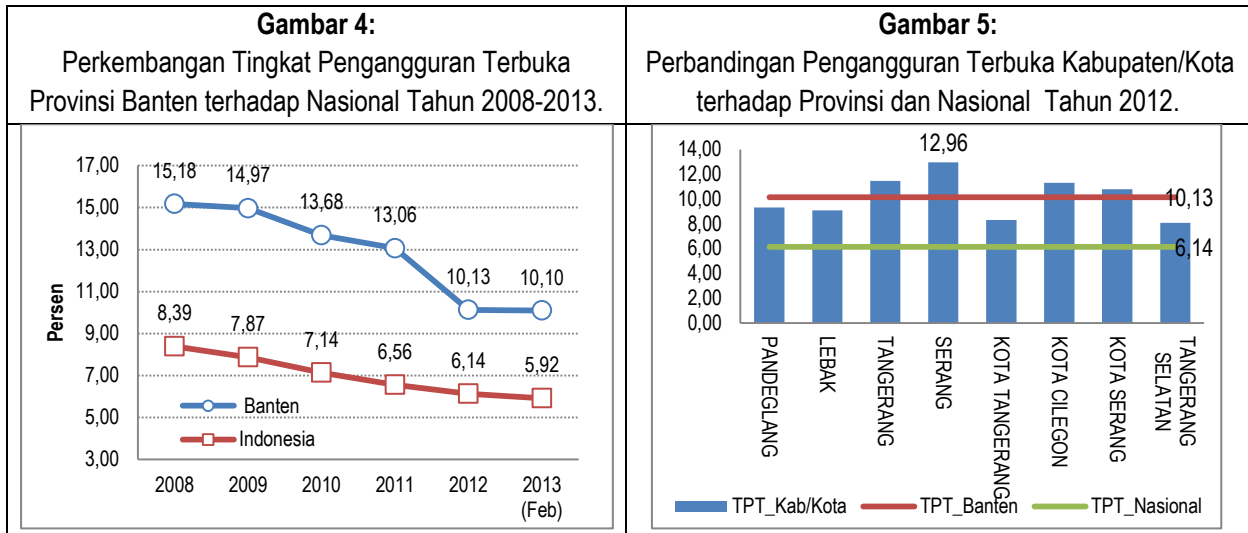
Penduduk Bekerja. Perkembangan jumlah penduduk bekerja di Provinsi Banten selama 2008-2013 meningkat 1.254,08 ribu jiwa dengan jumlah penduduk bekerja tahun 2013 mencapai 4.923 ribu jiwa. Penyebaran jumlah penduduk bekerja terbesar di Kabupaten Tangerang mencapai 1.175,84 ribu jiwa. Sebagian besar penduduk bekerja menggantungkan pendapatnya di sektor industri (25,84%) dan sektor perdagangan (24,36%). Sementara dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, sebagian besar penduduk bekerja merupakan tamatan sekolah dasar dan menengah.

Gambar 3:
Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan dan Lapangan Usaha di Provinsi Banten Tahun 2012



Sumber : Sakernas (Agustus), BPS 2012

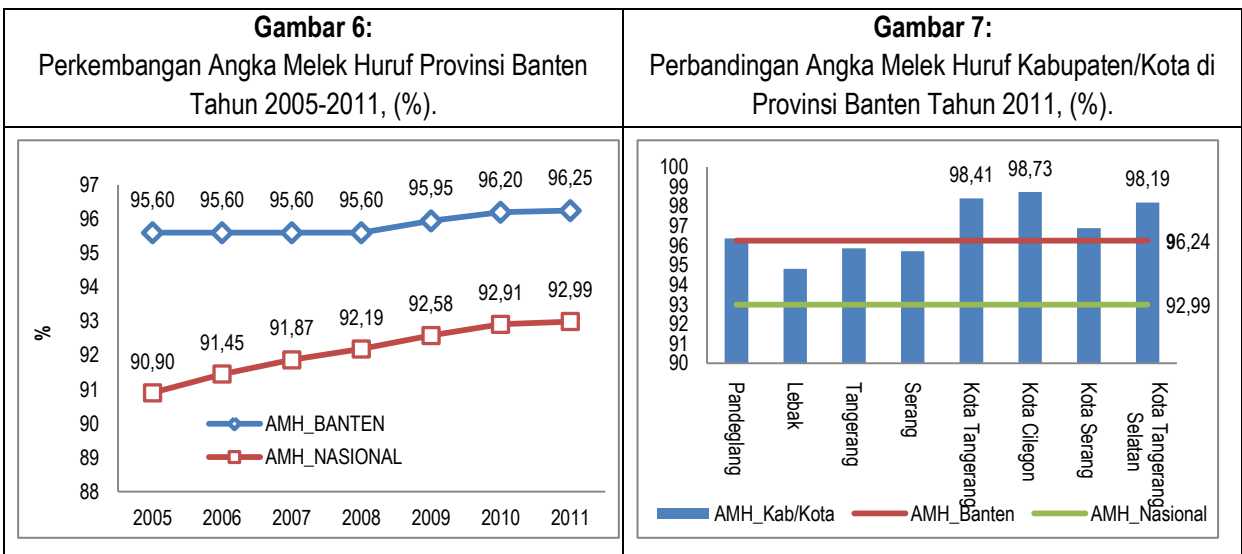
Pengangguran Terbuka. Jumlah pengangguran Terbuka di Provinsi Banten pada tahun 2013 (Feb.) mencapai 552,9 ribu jiwa menurun dibanding tahun 2008 (656,56 ribu jiwa) atau berkurang sebanyak 103,7 ribu jiwa. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), TPT selama periode tahun 2008-2013 menurun sebesar 5,08 persen, TPT Banten tahun 2013 masih tergolong tinggi diatas rata-rata nasional yaitu mencapai 10,10 persen. Sementara untuk TPT tahun 2012 terbesar di Kabupaten Serang sebesar 12,96 persen dan terendah di Kota Tangerang Selatan (8,07 %).



Sumber : Sakernas (Agustus), BPS 2012

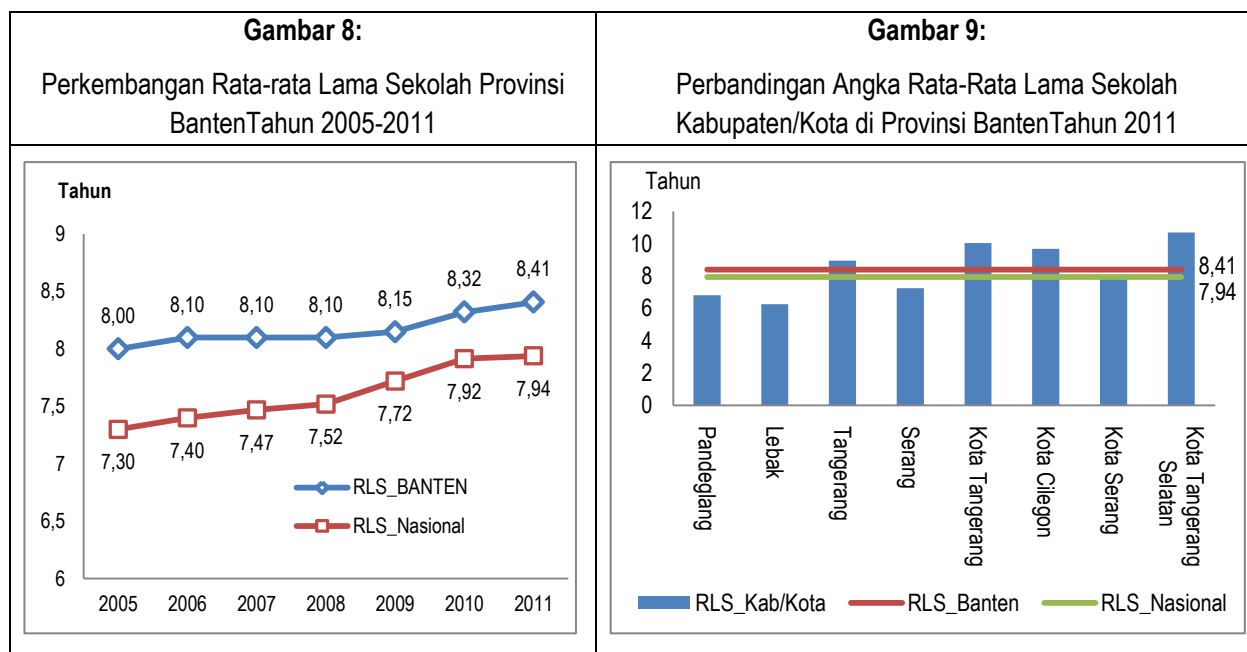
B3. Kondisi Pendidikan

Perkembangan kondisi pendidikan menurut indikator Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS), secara umum kondisi pendidikan di Provinsi Banten menunjukkan perbaikan dalam lima tahun terakhir (2005-2011). Pada tahun 2011 Rata-rata Lama Sekolah mencapai 8,41 tahun dan Angka Melek Huruf mencapai 96,25% berada di atas rata-rata nasional. Sementara untuk perbandingan RLS antar kabupaten/kota, RLS tertinggi terdapat di Kota Tangerang Selatan (10,70 tahun) dan terendah Kabupaten Lebak (6,25 tahun). Sementara untuk AMH mencapai 96,25 persen lebih tinggi dari AMH nasional (92,99%), dengan AMH tertinggi di Kota Cilegon (98,73%) dan terendah di Kabupaten Lebak (94,82%).



Sumber: BPS 2010

Sementara berdasarkan angka Rata-rata Lama Sekolah tahun 2011 mencapai 8,41 tahun berada di atas rata-rata RLS nasional. Sementara untuk perbandingan RLS antar kabupaten/kota, RLS tertinggi terdapat di Kota Tangerang Selatan (10,70 tahun) dan terendah Kabupaten Lebak (6,25 tahun).



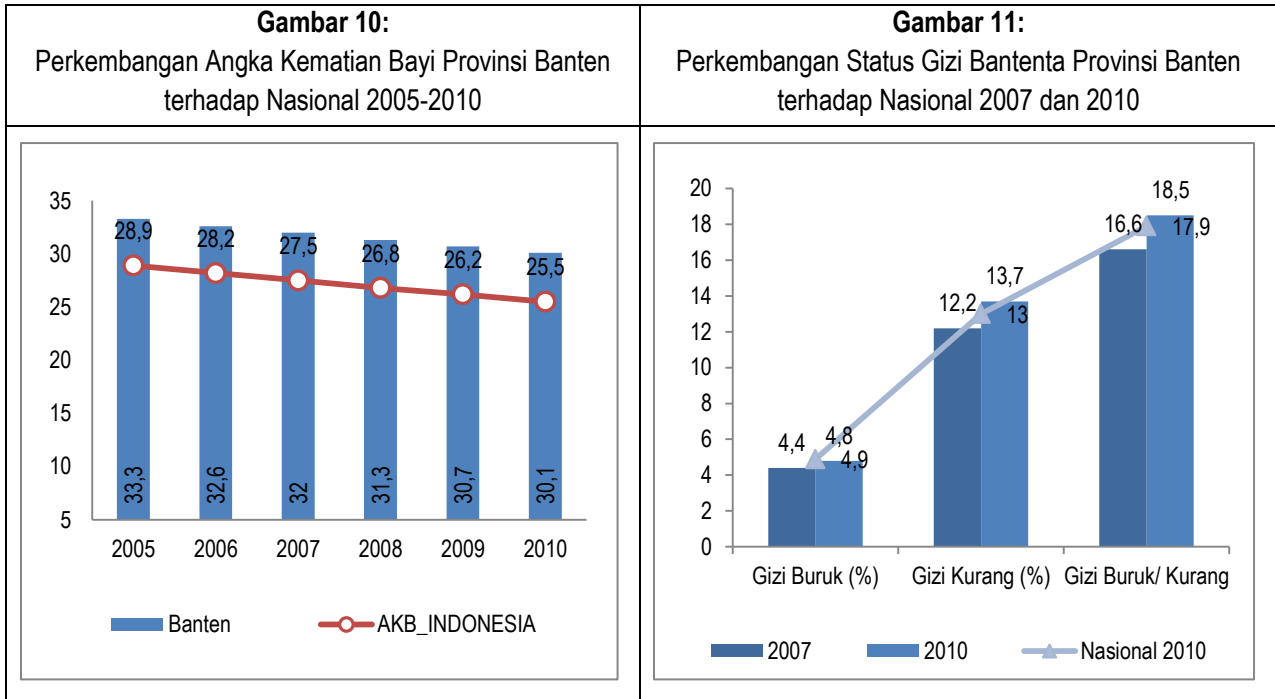
Sumber: BPS, Tahun 2011

B4. Kesehatan

Perkembangan derajat kesehatan penduduk antarprovinsi di wilayah Banten selama periode terakhir menunjukkan kondisi perbaikan, yang diindikasikan oleh menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), dan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH). Kondisi ini sejalan dengan perkembangan perbaikan kondisi kesehatan secara nasional yang cenderung terus membaik.

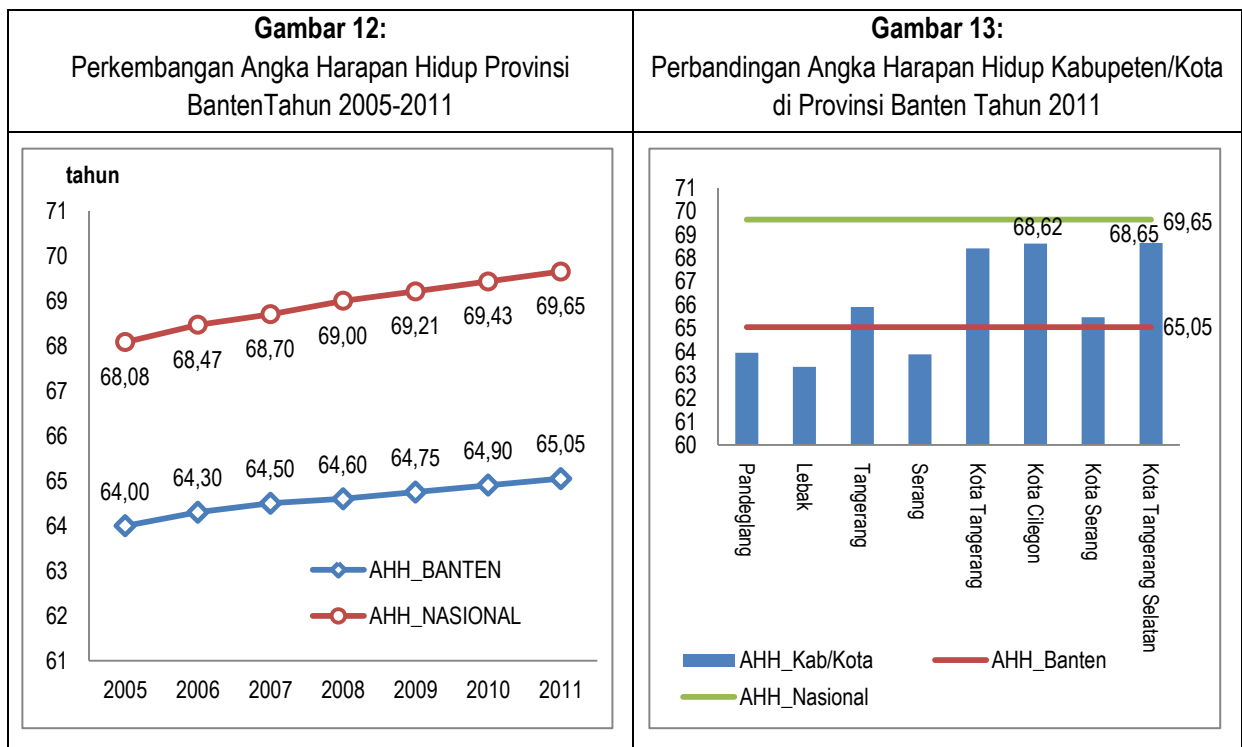
Angka Kematian Bantenta (AKB), Menurut hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), kondisi AKB menunjukkan perbaikan dalam lima tahun terakhir (2005-2010), AKB tahun 2010 sebesar 30,1 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Namun kondisi AKB Provinsi Banten masih tergolong tinggi dan berada di atas rata-rata AKB nasional.

Status Gizi Banten, Kondisi kesehatan masyarakat berdasarkan indikator status gizi Banten, merupakan gangguan pertumbuhan bayi yang terjadi sejak usia dini (4 bulan) yang ditandai dengan rendahnya berat badan dan tinggi badan, dan terus berlanjut sampai usia Banten. Hal tersebut terutama disebabkan rendahnya status gizi ibu hamil. Perkembangan status gizi Banten untuk persentase Banten gizi buruk/kurang meningkat pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2007, dan lebih tinggi dibandingkan nasional



Sumber: BPS, Tahun 2011

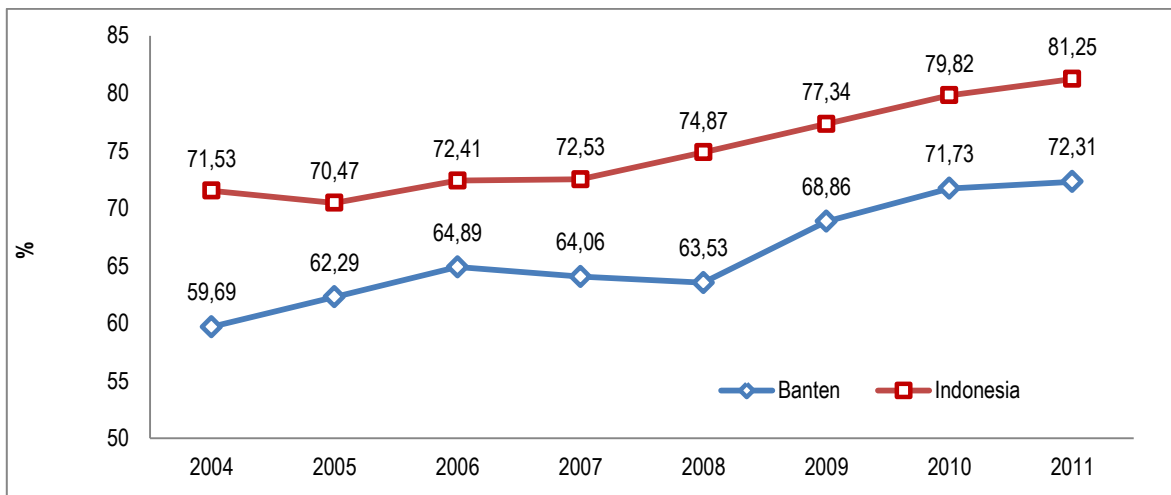
Angka Harapan Hidup (AHH), perkembangan AHH Provinsi Banten dan kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir meningkat, sejalan dengan perkembangan AHH secara nasional. AHH Provinsi Banten tahun 2011 mencapai 65,05 tahun masih lebih rendah dibandingkan terhadap AHH nasional. Sementara untuk perbandingan AHH antar kabupaten/kota tahun 2011 di Provinsi Banten, AHH tertinggi berada di Kota Tangerang Selatan sebesar 68,65 tahun lebih tinggi dari AHH provinsi dan lebih rendah dari AHH nasional, dan terendah di Kabupaten Lebak (63,35 tahun).



Sumber: BPS, Tahun 2011

Indikator kesehatan lainnya yang menggambarkan kinerja dari pelayanan kesehatan bagi masyarakat adalah kondisi kesehatan ibu dan bayi yang berkaitan dengan proses melahirkan. Kondisi ini dapat ditunjukkan melalui data persentase kelahiran Bantenta menurut penolong kelahiran terakhir. Perkembangan dari persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga medis dalam lima tahun terakhir di Provinsi Banten terus meningkat dan lebih rendah dari angka nasional.

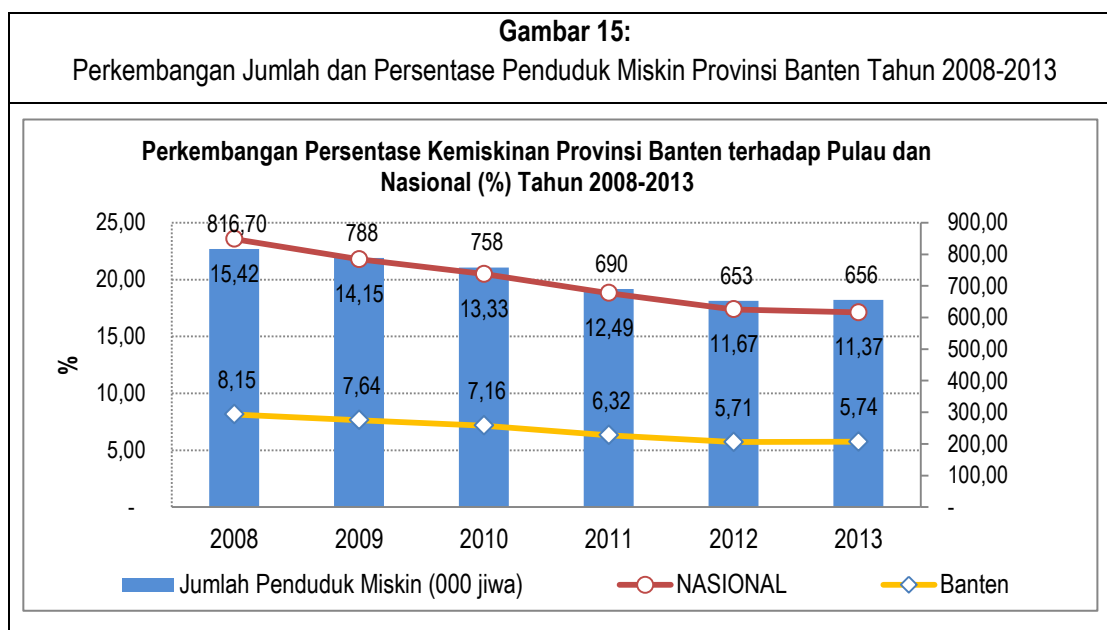
Gambar 14:
Perkembangan Persentase Kelahiran Banten Ditolong Tenaga Menis terhadap Nasional
Tahun 2004-2011



Sumber: BPS, Tahun 2011

B5. Kondisi Kemiskinan

Perkembangan kemiskinan di Provinsi Banten selama periode 2008-2013, secara absolut terjadi penurunan, jumlah penduduk miskin tahun 2013 (Maret) sebanyak 656 ribu jiwa atau menurun sebanyak 160,45 ribu jiwa. Sementara untuk persentase kemiskinan tahun 2013 sebesar 5,74 persen atau menurun sebesar 2,41 persen, tingkat kemiskinan Banten tergolong rendah dibandingkan tingkat kemiskinan nasional.



Sumber: BPS, Tahun 2012

Penyebaran penduduk miskin terbesar tahun 2011 di Kabupaten Tangerang yaitu sebanyak 188,70 ribu jiwa dan Pandeglang sebanyak 117,60 ribu jiwa, dan terendah di Kota Tangerang Selatan sebesar 20,10 ribu jiwa. Sementara untuk penyebaran tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Pandeglang sebesar 9,80% dan tingkat kemiskinan terendah di Kota Tangerang Selatan sebesar 1,50%.

Tabel 4:

Perkembangan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2006-2011

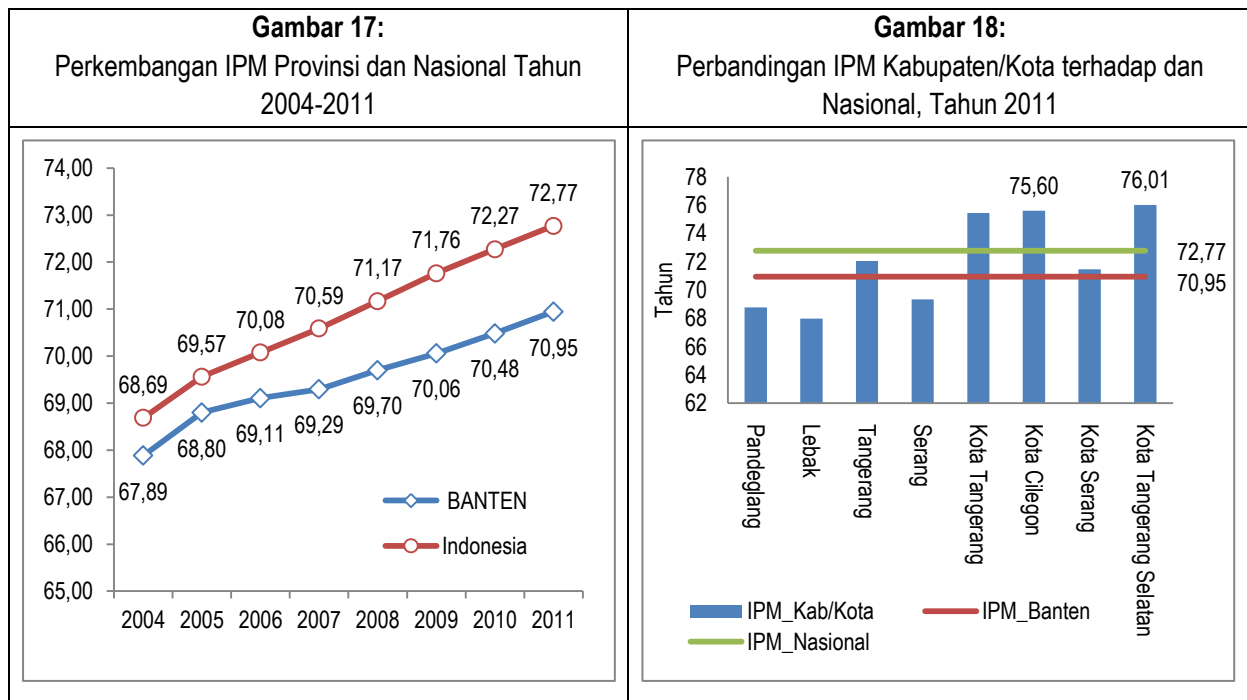
Kabupaten/Kota	Penduduk Miskin (000)			Presentase Kemiskinan (%)		
	2006	2011	Δ 2006-2011	2006	2011	Δ 2006-2011
Pandeglang	170,3	117,60	52,70	15,82	9,80	6,02
Lebak	172,4	115,20	57,20	14,55	9,20	5,35
Tangerang	279,1	188,70	90,40	8,28	6,42	1,86
Serang	170,8	82,00	88,80	9,55	5,63	3,92
Kota Tangerang	95,1	114,30	-19,20	6,41	6,14	0,27
Kota Cilegon	16,6	15,50	1,10	4,99	3,98	1,01
Kota Serang		37,40	-37,40		6,25	-6,25
Kota Tangerang Selatan		20,10	-20,10		1,50	-1,50

Keterangan: *) data kemiskinan Kabupaten/Kota 2011 belum tersedia

Sumber : BPS, Tahun 2011

B6. Perkembangan IPM

Perkembangan IPM Provinsi Banten dalam kurun waktu 2004-2011 semakin membaik, IPM Provinsi Banten tahun 2011 mencapai 70,99 masih rendah dibandingkan rata-rata IPM nasional (72,77), dengan ranking IPM Provinsi Banten tahun 2011 menduduki peringkat ke 23 secara nasional setelah Jawa Timur dan peringkat ke 7 di Pulau Jawa+Banten setelah Jawa Timur. Perbandingan IPM antar kabupaten/kota tahun 2011, IPM tertinggi adalah Kota Tangerang Selatan (76,01) dan menduduki peringkat ke-70 secara nasional, dan IPM terendah adalah Kabupaten Lebak yaitu 67,98 dan berada di peringkat ke-420 secara nasional.



Sumber: BPS Tahun 2011

C. PEREKONOMIAN DAERAH

C1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

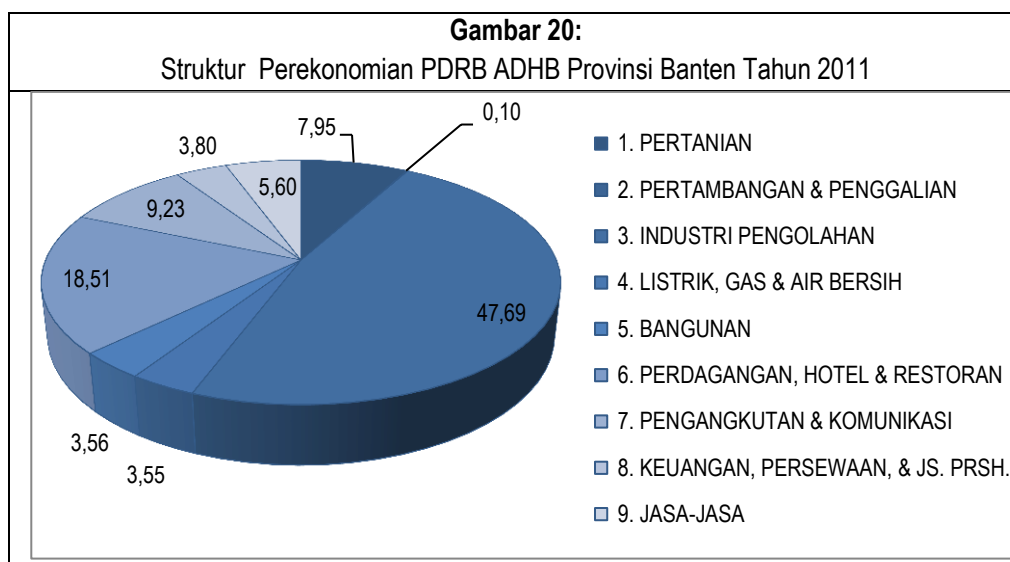
PDRB Provinsi DKI Jakarta menurut harga lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan migas tahun 2012 mencapai 212.856,63 miliar rupiah dan tanpa migas sebesar 139.865 miliar rupiah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. PDRB ADHB dengan migas Provinsi DKI menyumbang sebesar 3,16 persen terhadap PDB nasional (33 provinsi). Sementara untuk PDRB ADHK tahun 2000, nilai PDRB dengan migas sebesar 100.000 miliar rupiah dan tanpa migas sebesar 100.000 milyar rupiah.

Tabel 5:
Perkembangan PDRB ADHB-ADHK dengan Migas dan Tanpa Migas Provinsi Banten
Tahun 2008-2012, (miliar rupiah).

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
2008	139.865	139.865	79.701	79.701
2009	152.556	152.556	83.454	83.454
2010	171.748	171.748	88.552	88.552
2011	192.227	192.227	94.207	94.207
2012	212.857	212.857	100.000	100.000

Sumber: BPS Tahun 2013

Struktur perekonomian Provinsi Banten pada tahun 2011, kontribusi terbesar adalah Sektor dengan kontribusi besar terhadap perekonomian Banten adalah sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 47,69 %, sektor perdagangan, hotel dan restoran (18,51 %), dan sektor pengangkutan dan komunikasi (9,23%). Selain ketiga sektor diatas, sektor lainnya yang memiliki kontribusi cukup besar adalah sektor pertanian (7,95%), dan sektor jasa (5,60%)



Sumber: BPS tahun 2011

Perbandingan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan migas 2011 kabupaten/kota di Provinsi Banten, menunjukkan adanya kesenjangan pendapatan yang cukup tinggi, dimana PDRB tertinggi mencapai 63.774 miliar rupiah (Kota Tangerang) dan PDRB terendah sebesar 9.312 miliar rupiah (Kabupaten Lebak).

Tabel 5:

Perbandingan Nilai PDRB ADHB Kabupaten/Kota di Banten Tahun 2011. (Rp. miliar)

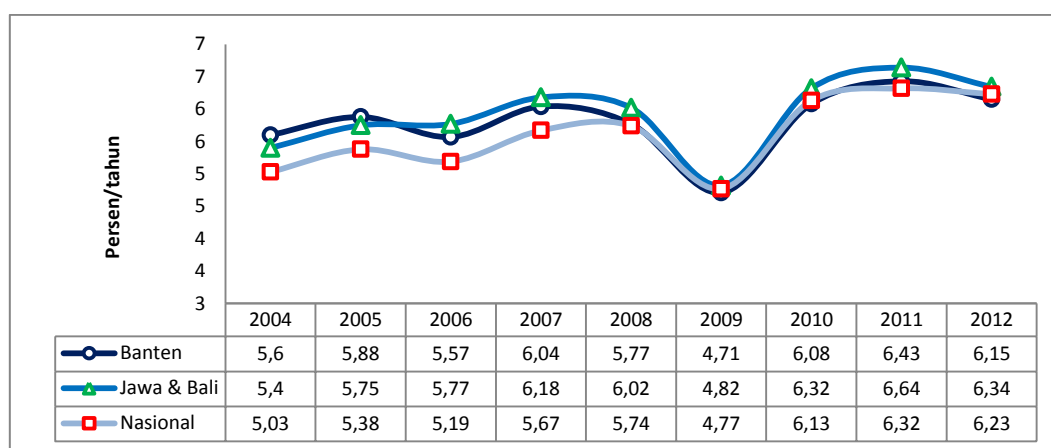
KABUPATEN/KOTA	2007	2008	2009	2010*	2011**
Kab. Pandeglang	6.123	6.939	7.658	8.695	9.619
Kab. Lebak	6.029	6.754	7.524	8.421	9.312
Kab. Tangerang	33.062	37.369	30.885	34.802	39.993
Kab. Serang	13.731	10.730	11.497	12.642	14.241
Kota Tangerang	39.356	44.691	49.332	56.923	63.774
Kota Cilegon	22.423	25.203	28.019	31.296	34.476

Sumber: BPS tahun 2011

Perkembangan ekonomi Banten dalam tiga tahun terakhir mengalami percepatan, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2012 mencapai 6,15% lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara untuk pertumbuhan sektor, seluruh sektor tumbuh positif pada tahun 2011 dan sektor dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi serta sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi Banten adalah: sektor pengangkutan dan komunikasi (11,94%), sektor perdagangan (9,51%), dan bangunan (8,75%).

Gambar 21:

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten terhadap Nasional Tahun 2004-2012, (%)



Sementara untuk pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, seluruh kabupaten/kota rata-rata tumbuh positif, dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Tangerang dengan laju pertumbuhan sebesar 7,35%, dan pertumbuhan terendah di Kabupaten Pandeglang dengan laju pertumbuhan sebesar 5,40% dan Kabupaten Serang dengan laju pertumbuhan ekonomi 5,67%.

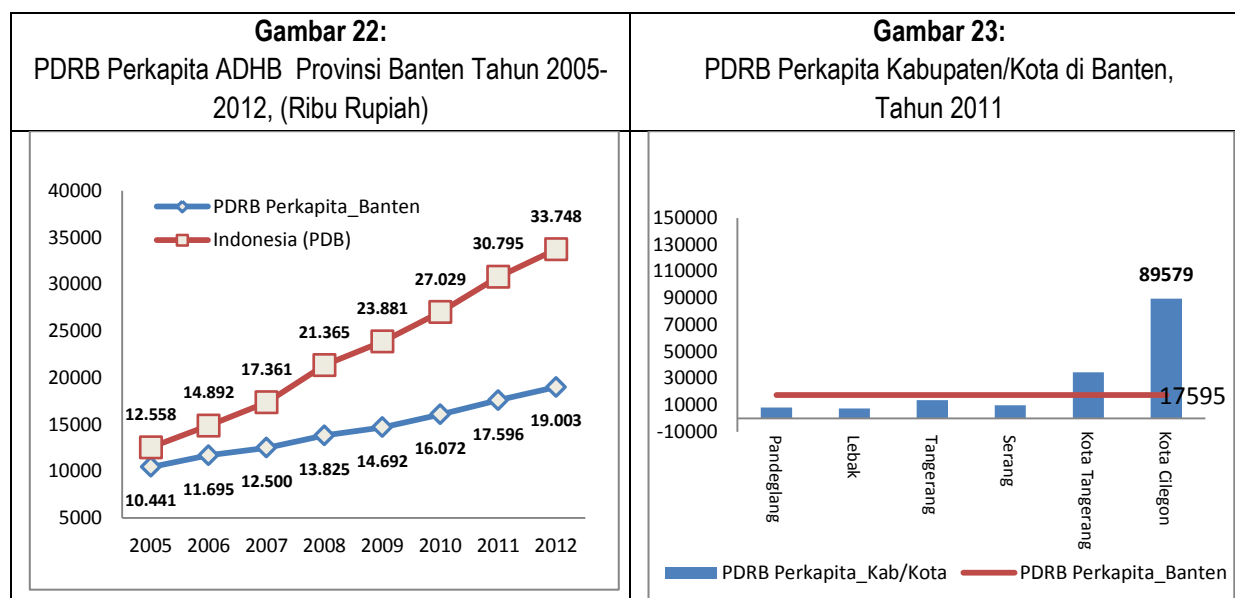
Tabel 6:

Laju Pertumbuhan PDRB dengan Migas ADHK 2000 Menurut Kabupaten di Provinsi Banten Tahun 2007-2011 (persen)

KABUPATEN/KOTA	Tahun				
	2007	2008	2009	2010*	2011**
Kab. Pandeglang	4,48	4,29	5,43	7,16	5,40
Kab. Lebak	4,90	4,06	5,18	6,59	6,44
Kab. Tangerang	6,61	6,17	5,29	6,71	7,35
Kab. Serang	5,12	4,41	3,18	4,15	5,67
Kota Tangerang	6,86	6,37	5,74	6,68	7,03
Kota Cilegon	5,53	5,13	5,08	5,32	6,53
BANTEN	6,04	5,77	4,71	6,08	6,43

Sumber: BPS, 2011

PDRB perkapita dengan migas ADHB Provinsi Banten dan kabupaten/kota dari tahun 2005-2012 meningkat setiap tahunnya, PDRB perkapita tahun 2012 Banten mencapai sebesar 19.003 ribu/jiwa lebih rendah dari PDRB perkapita nasional (33.748 ribu/jiwa). Sementara untuk perbandingan PDRB perkapita kabupaten/kota di Banten kecenderungan adanya kesenjangan yang cukup tinggi, dimana sebagian besar kabupaten/kota memiliki PDRB perkapita dibawah rata-rata PDRB perkapita provinsi, dengan PDRB perkapita tertinggi mencapai 89.579 ribu/jiwa terdapat di Kota Cilegon dan terendah sebesar 7.526 ribu/jiwa di Kabupaten Lebak.



D2. Investasi PMA dan PMDN

Perkembangan realisasi investasi PMA Provinsi Banten dalam tiga tahun terakhir meningkat, realisasi investasi PMA tahun 2012 tercatat sekitar 2.716,26 juta US\$ meningkat dibandingkan tahun 2011 (2.171,69 juta US\$) atau sekitar 2,48 persen dari total PMA nasional dengan jumlah proyek sebanyak 405 proyek. Hal ini juga ditunjukkan dengan PMDN dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, realisasi investasi PMDN tahun 2012 Provinsi Banten mencapai 5.117,54 miliar rupiah meningkat dari nilai PMDN 2011 (4.298,57 miliar rupiah) atau sekitar 4,12 persen dari total PMDN secara nasional dengan jumlah proyek sebanyak 66 proyek.

Tabel 7:
Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Provinsi Banten Tahun 2010-2012

Tahun	PMA		PMDN	
	Juta US\$	Proyek	Rp. Miliar	Proyek
2010	1.544,19	280	5.852,52	76
2011	2.171,69	361	4.298,57	83
2012	2.716,26	405	5.117,54	66

E. PRASARANA WILAYAH

E1. Jaringan Irigasi

Pembangunan jaringan irigasi merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan produksi pangan, serta dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Luas Potensial jaringan irigasi di Banten meliputi 8,67 hektar atau 1,97 persen dari jaringan irigasi potensial di Indonesia. Sementara untuk jaringan irigasi terbangun tersier sekitar 9.598 hektar dan luas jaringan irigasi utama sekitar 143.008 hektar. Sementara menurut kewenangan, sekitar 9.598 hektar atau sekitar dan kewenangan pusat, 31.905 hektar, 31.905 kewenangan provinsi, dan 101.505 hektar kewenangan kabupaten/kota.

E2. Infrastruktur Jalan

Kondisi panjang jalan berdasarkan status pembinaannya tahun 2011 di Provinsi Banten mencapai 17.457 km, yang terdiri dari jalan Nasional sepanjang 1.803,36 km, jalan Provinsi sepanjang 1813,33 km, dan Jalan Kabupaten/kota sepanjang 13841,07 km. Untuk kondisi kualitas jalan menurut kriteria IRI (*International Roughness Index*), Departemen PU), kualitas jalan nasional tidak mantap di Provinsi Banten pada tahun 2011 mencapai 118,31 km yang terdiri dari 2,18 persen kondisi jalan rusak ringan dan 4,38 persen dengan kondisi rusak berat. Sementara untuk kondisi jalan mantap sepanjang 1.685,04 km atau sekitar 93,44 persen kondisi jalan mantap di Banten.

Berdasarkan rasio panjang jalan dengan luas wilayah yang mengindikasikan kepadatan jalan (*Road Density*), kepadatan jalan di Provinsi Banten sebesar 7,36 Km/Km² lebih tinggi dari kepadatan jalan tingkat nasional (0,23 Km/Km²). Sementara panjang jalan menurut kondisi permukaan jalan, jalan beraspal di Provinsi Banten meliputi 87 persen dari total panjang jalan, dan sisanya 2 persen jalan kerikil, 10 persen jalan tanah dan lainnya.

Tabel 8.

Panjang Jalan Menurut Provinsi dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km)

Provinsi	Negara	Provinsi	Kab / Kota	Jumlah
Banten	476,49	770,09		1246,58

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Kab/Kota

Tabel 9.

Kondisi Kemantapan Jalan Nasional Provinsi Banten Tahun 2011 Berdasarkan Kerataan Permukaan Jalan (IRI)
Status : Awal Agustus 2011

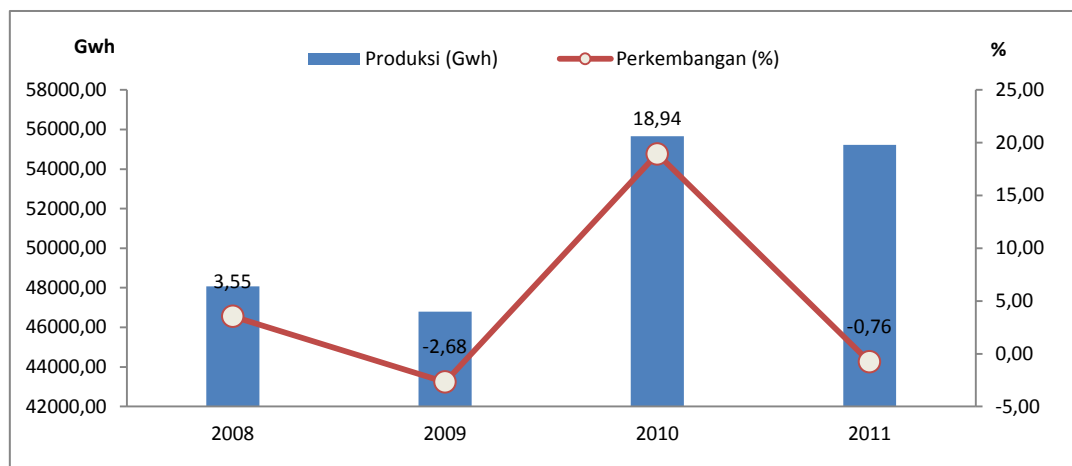
Panjang Kepmen PU (km)	Kondisi Permukaan Jalan (km)				Kondisi Kemantapan (km)		Kondisi Permukaan Jalan (%)				Kondisi Kemantapan (%)	
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Mantap	Tidak Mantap	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Mantap	Tidak Mantap
476,49	223,48	226,21	10,32	16,48	449,70	26,80	46,90	47,47	2,17	3,46	94,38	5,62

Sumber: Subdit Informasi dan Komunikasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Kementrian PU

E3. Jaringan Listrik

Perkembangan jumlah produksi listrik yang dibangkitkan di Provinsi Banten dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah produksi energi listrik tahun 2011 mencapai 55229,41 Gwh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya 55653,96 Gwh.

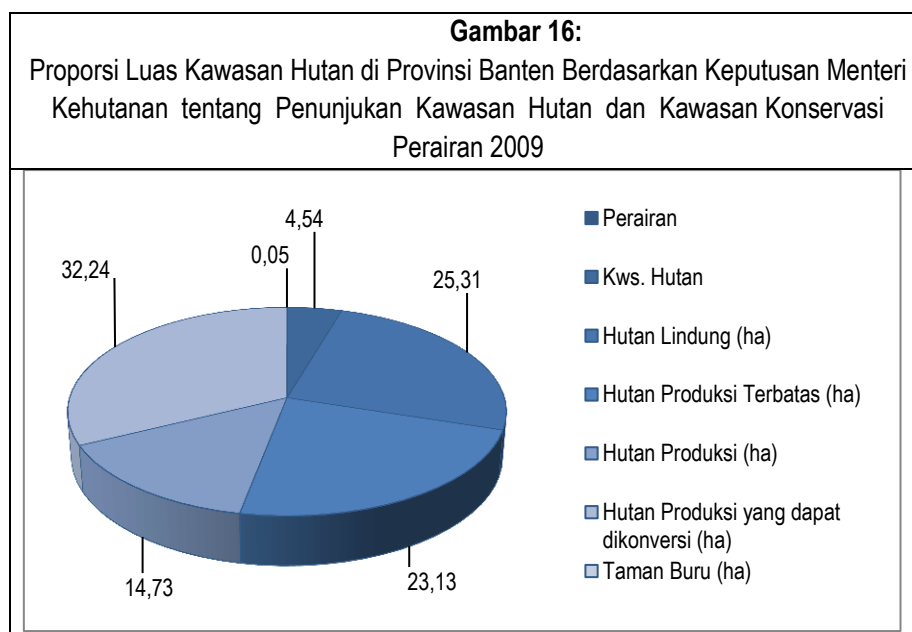
Gambar 25:
Tenaga Listrik Yang Dibangkitkan Provinsi Banten



F. POTENSI SUMBERDAYA ALAM

F1. Sumber Daya Lahan

Luas kawasan hutan dan perairan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan tahun 2009 di Wilayah Banten tercatat sekitar 7.149.524 hektar atau 0,1 persen dari total nasional. Proporsi penggunaan kawasan hutan dan perairan terluas adalah hutan produksi terbatas sebesar 2.304.932 hektar atau sekitar 32,24 persen dari total kawasan hutan di Banten. Hutan lindung sekitar 1.809.634 hektar (25,32), dan hutan produksi terbatas 1.653.625 hektar (23,13) .



Potensi sumber daya lahan di Provinsi Banten dilihat dari penggunaan lahannya yang dapat dibedakan atas penggunaan lahan pertanian dan bukan pertanian. Potensi penggunaan lahan dipengaruhi oleh jenis tanah, sumber daya mineral, vegetasi, topografi, iklim, dan lokasi. Pada tahun 2010, lahan pertanian di Banten mencapai 356.023 hektar atau telah terjadi pengurangan sebesar 0,06 persen dari tahun sebelumnya 356.237 hektar. Sedangkan lahan bukan pertanian mencapai 207.643 hektar atau terjadi peningkatan 0,10 persen dari tahun sebelumnya 207.429 hektar.

F2. Potensi Pertanian

Sektor pertanian di Banten kemBanten menjadi sorotan, tidak sedikit kalangan dan praktisi yang beranggapan bahwa pertanian bisa menjadi pilar pendukung bagi perekonomian Banten. Secara umum, penggunaan lahan dibedakan atas penggunaan lahan pertanian dan bukan pertanian. Potensi penggunaan lahan dipengaruhi oleh jenis tanah, sumber daya mineral, vegetasi, topografi, iklim, dan lokasi. Pada tahun 2010, lahan pertanian di Banten mencapai 356.023 hektar atau telah terjadi pengurangan sebesar 0,06 persen dari tahun sebelumnya 356.237 hektar. Sedangkan lahan bukan pertanian mencapai 207.643 hektar meningkat 0,10 persen dari tahun sebelumnya 207.429 hektar.

F3. Potensi Perikanan dan Kelautan

Optimalisasi sektor perikanan sebagai pendukung perekonomian Banten perlu ditingkatkan karena ekspor hasil perikanan sangat menjanjikan bagi perolehan devisa Banten ke depan. Secara keseluruhan jumlah produksi ikan (perikanan laut dan perikanan darat) pada tahun 2010 mencapai 245.806,1 ton meningkat 1,02 persen dibandingkan tahun 2009 mencapai 243.318,9 ton. Kenaikan jumlah produksi ikan ternyata tidak dibarengi dengan nilai produksi yang justru turun 5,90 persen, dari Rp 1.101.451.860 ribu di tahun 2009 menjadi Rp 1.366.092.746 ribu di tahun 2010.

F4. Potensi Sumberdaya Mineral

Peningkatan kebutuhan listrik dan air bersih, harus dibarengi oleh peningkatan produksi secara kontinyu. Pada tahun 2010 produksi listrik di Banten mencapai 3.270.168,03 KWh meningkat sebesar 10,72 persen dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 2.953.591,54 KWh. Hal ini seiring dengan peningkatan jumlah pelanggan yang mencapai 4,21 persen, yaitu dari 752.149 menjadi 783.825 pelanggan.

Sementara itu peningkatan kebutuhan air bersih tercermin dari meningkatnya jumlah pelanggan (dari 316.475 menjadi 322.013). hal ini membuat jumlah penggunaan/produksi terjual meningkat 1,52% yaitu dari 122.332 m³ menjadi 124.189 m³, sehingga membuat total penerimaan juga mengalami peningkatan menjadi Rp 313,27 milyar.